

## ABSTRAK

**Fajar Efendi Daulay. Analisis Implementasi Kebijakan Kepengawasan SMK di Kota Tebing Tinggi. Tesis: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan. 2018**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan kepengawasan SMK di Tebing Tinggi berdasarkan model Mazmanian dan Sabatier. Subjek penelitian ini adalah koordinator pengawas SMK dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, kepala sekolah dan guru. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Data dianalisis dengan cara reduksi, kategorisasi, sintesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemudahan, pertama, kelompok sasaran dari kebijakan ini adalah homogen, kedua, kebijakan ini menghendaki perubahan perilaku pengawas sekolah menjadi pengawas yang berkinerja baik. Selain kemudahan, kebijakan ini juga mempunyai kesulitan, yaitu : pertama, tidak adanya sosialisasi kebijakan kepada pengawas sekolah. Selain itu, kebijakan ini masih menggunakan format DP3 dalam melakukan penilaian kinerja pengawas sekolah dan pemberhentian sementara pengawas sekolah, kedua, keberagaman perilaku yang diatur dalam kebijakan ini adalah heterogen. Struktur proses implementasi kebijakan yang terkandung dalam kebijakan pengawasan SMK di Tebing Tinggi adalah pertama, kebijakan ini telah disusun secara jelas sesuai dengan skala prioritas/urutan kepentingan bagi pengawas SMK. Kedua, Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2010 menjelaskan tugas pokok pengawas *Kedua*, kebijakan ini tidak mengatur tentang biaya untuk pengawas sekolah. *Ketiga*, Kebijakan ini telah mendapat dukung dari dinas pendidikan dengan cara membuat aturan-aturan seperti laporan bulanan dikumpul setiap awal bulan. Keempat, . Pengangkatan pengawas lebih kepada jenjang karir yaitu di mulai dari guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. *Kelima*, Kebijakan ini memberikan akses formal pihak luar sangat terbatas. Faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengawasan SMK di Tebing Tinggi meliputi kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik yang tinggi, dan kesepakatan kepemimpinan dan kepemimpinan pejabat pelaksana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan kebijakan pengawasan di Tebing Tinggi belum dilaksanakan sesuai dengan Permenpan RB no. 21 tahun 2010

Kata kunci: Implementasi, Pengawasan, Kebijakan

## ABSTRAK

**Fajar Efendi Daulay. Analysis of Implementation of Vocational High School Supervision Policy in Tebing Tinggi. Thesis: Department of Post Graduate State University of Medan. 2018**

This study aims to determine the implementation of Vocational High School supervision policy in Tebing Tinggi based on Mazmanian and Sabatier models. The subject of this research is the coordinator of vocational supervisor and Head of Education Office of Kota Tebing Tinggi, principal, and teacher. Data collection is done by interview, documentation, and observation. Data were analyzed by means of reduction, categorization, synthesis. The results show that the level of convenience, first, the target group of this policy is homogeneous; second, the policy requires changes in the behavior of school supervisors into good performers. In addition to convenience, this policy also has difficulties, namely: first, the lack of socialization policy to school supervisors. In addition, this policy still uses the DP3 format to assess the performance of school supervisors and the temporary dismissal of school supervisors; secondly, the diversity of behaviors set out in this policy is heterogeneous. The structure of the policy implementation process contained in the SMK supervision policy in Tebing Tinggi is first, the policy has been clearly established in accordance with the priority/order of importance for the vocational supervisors. Second, Permenpan RB Number 21 of 2010 explains the main task of supervisor. Second, this policy does not regulate the cost for school supervisors. Third, the Policy has been supported by the education office by making rules such as monthly reports collected at the beginning of each month. Fourth, Appointment of supervisors more to career level that is starting from the teacher, principal, and school supervisor. Fifth, this policy provides outside formal access is very limited. External factors that influence the implementation of SMK supervision policy in Tebing Tinggi include socio-economic and technological conditions, high public support, and leadership and leadership agreements of executing officials. The conclusion of this research is that the implementation of supervision policy in Tebing Tinggi has not been implemented in accordance with Permenpan RB no. 21 of 2010.

Keywords: Implementation, Supervision, Policy